

Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas LKPD Kabupaten TTU

Internal Control as a Moderator of the Influence of HR Competence on the Quality of the TTU District LKPD

Paulina Rosna Dewi Redjo

dewiredjo@unimor.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Timor

Abstract

This type of research is quantitative by using a survey method that located in North Central Timor District. Sample of this study used all existing DPOs to represent past and future DPOs. The variables used are human resource competence (X), government internal control (M) and the quality of financial reports (Y). The data analysis used the Structural Equation Modeling (SEM) method to test the two hypotheses proposed in this study. Each hypothesis will be analyzed using Partial Least Square (PLS) software, namely the WarpPLS version 3.0 software. The results show that there is an influence between human resource competence on the quality of financial reports in the district government of North Central Timor. The test results with the moderating variable show that there is no influence of human resource competence on the quality of financial reports in North Central Timor District which is moderated by the government's internal control system.

Keywords : human resource competence, government internal control quality of financial reports

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode survei yang dilakukan pada Kabupaten Timor Tengah Utara. Sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh OPD . Variabel yang digunakan adalah kompetensi sumber daya manusia (X), pengendalian internal pemerintah (M) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y). Analisis data menggunakan metode *Structural Equation Modelling* (SEM) untuk menguji dua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis akan dianalisis menggunakan software *Partial Least Square* (PLS) yaitu software WarpPLS versi 3.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil pengujian dengan variabel moderasi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah.

Kata Kunci: kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, kualitas laporan keuangan pemerintah

Pendahuluan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) seperti yang tertera dalam pasal 56 ayat 4 UU nomor 01 tahun 2004 yang isinya berbunyi kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkungan tempat kerjanya telah dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berguna untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Negara. Tujuan SPIP adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan bagi pemda digunakan untuk memperbaiki sistem pengendalian dan kinerja pemeriksaan internal. Pada tingkatan organisasi tujuan pengendalian internal berkaitan dengan keandalan laporan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi (Anggraeni, 2014).

Kualitas laporan juga dapat ditingkatkan melalui Penerapan Sistem pengendalian internal sehingga akan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (Afiah dan Aswari, 2015).

Ada lima komponen dalam membangun pengendalian internal yaitu (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pengawasan/ *monitoring* (PP Nomor 60 Tahun 2008; Arens *et al*, 2012). Laporan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diberikan kepada pemberi amanah karena melalui laporan, pemberi amanah dapat mengetahui posisi organisasi sehingga dapat mengambil keputusan tertentu untuk mendukung kelangsungan suatu organisasi. Bagi suatu entitas yang termasuk di dalamnya adalah pemerintah, laporan keuangan adalah media untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.

Laporan keuangan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi jika memiliki sumber daya manusia, oleh karena itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas sangat dibutuhkan adanya (SDM) yang memahami dan memiliki kompetensi dalam akuntansi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengamatkan penerapan otonomi daerah. Hal ini diwujudkan dengan memberikan kewenangan secara penuh kepada pemerintah agar dapat menyelenggarakan segala urusan pemerintahan, kecuali bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pelaksanaan otonomi daerah juga disertai dengan kebebasan dan kewenangan daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut ikhtiar dan dinamika sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.

Perolehan opini pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada tahun 2011 mendapat opini TMP dan pada tahun 2012 hingga tahun 2016 mendapat opini WDP. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK. Belum memadainya kualitas LKPD kabupaten TTU mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Adanya kelemahan sistem pengendalian internal;
2. Belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib;
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penyajian laporan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
5. Kelemahan dalam sistem penyusunan laporan;
6. Kurang memadainya kompetensi SDM sebagai pengelola pada pemerintah daerah

Tabel 1 Opini BPK Untuk Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2012-2016

Tahun	Opini BPK
2011	Tidak Mendapat Pendapat (TMP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : IHPS II tahun 2016 dan IHPS I Tahun 2017

Keterangan opini: WTP = Wajar Tanpa Pengecualian, WDP = Wajar Dengan Pengecualian, TMP = Tidak Mendapat pendapat, TW = Tidak Wajar

Metode

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, Sugiyono (2017) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif disebut sebagai positivistik karena berlandaskan pada filsafat *positivisme* dan juga sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Proses penelitian kuantitatif bersifat deduktif dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis untuk selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan.

Populasi Penelitian dan Sampel Penelitian

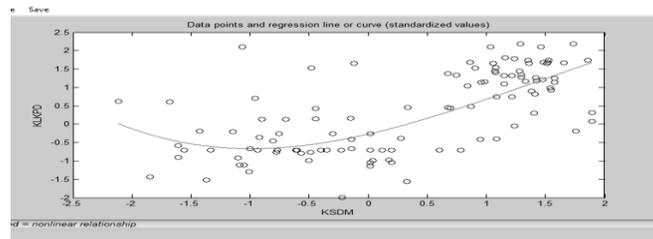
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh OPD yang ada saat ini untuk mewakili OPD yang lalu dan nanti yaitu berjumlah 56 OPD. Respondennya adalah pegawai yang bertugas pada OPD Kabupaten Timor Tengah Utara yang memiliki tanggungjawab dan tugas pokok dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 180 orang.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Modelling* (SEM) untuk menguji keenam hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis akan dianalisis menggunakan software *Partial Least Square* (PLS) yaitu software *Warp PLS* versi 3.0. Menguji hubungan antar variabel. Menurut Ghozali (2011) tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan antar variabel laten dan estimasi loading antara variabel laten dengan blok indikatornya. Ketiga berkaitan dengan

means dan lokasi parameter (nilai konstan regresi, intersep) untuk indikator dan variabel laten. Ketiga estimasi tersebut memperoleh ketiga estimasi tersebut, PLS menggunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama menghasilkan penduga bobot (*weight estimate*), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta). Pada dua tahap pertama proses iterasi dilakukan dengan pendekatan deviasi (penyimpangan) dari nilai means (rata-rata). Pada tahap ketiga, estimasi bisa didasarkan pada matriks data asli (Ghozali, 2011)

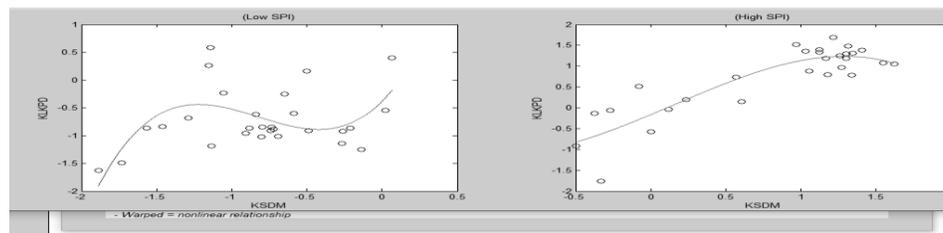
Hubungan nonlinear antara kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan pemerintah.



Gambar 1 Hubungan non linear X dan Y
Hasil Output WarpPLS 3.0 yang telah diolah

Hasil dari warp PLS yang dapat dilihat pada gambar 1 menunjukkan adanya hubungan nonlinear antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah dengan kurva mirip huruf S. Dari gambar di atas dapat dikatakan bahwa kompetensi SDM yang kurang baik yang dapat ditinjau dari aspek pendidikan, pengetahuan, pelatihan dan pengalaman kerja dapat menurunkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pada titik 0 hingga -0,6. Namun dengan kompetensi SDM yang lebih tinggi pada titik -1 yang dapat ditinjau dari aspek pendidikan, pengetahuan, pengadaan pelatihan dan diklat secara berkala serta pengalaman kerja yang lebih lama dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pada titik optimal 1,6 kualitas laporan keuangan.

Hubungan nonlinear antara kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan pemerintah dengan pengendalian internal sebagai pemoderasi.



Gambar 2 Hubungan non linear X, M dan Y
Hasil Output WarpPLS 3.0 yang telah diolah

Dimana, X = kompetensi SDM

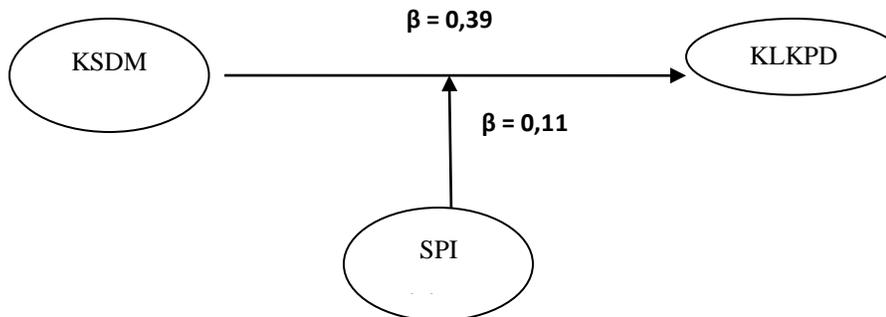
M = sistem pengendalian internal (SPI)

Y = kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (KLKPD)

Gambar 2 menjelaskan hubungan nonlinear antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan dengan pengendalian internal sebagai pemoderasi. Gambar di atas merupakan plot hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan

keuangan dalam dua kondisi yaitu dengan pengendalian internal yang rendah dan pengendalian internal yang tinggi. Dalam kondisi pengendalian internal rendah dan dengan kompetensi SDM yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan hingga titik optimal -0,5. Dalam kondisi pengendalian internal tinggi dan disertai dengan kompetensi SDM yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan hingga titik optimal 1,3. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu pengendalian internal dapat memperkuat/meningkatkan hubungan antara kompetensi SDM dan kualitas laporan keuangan.

Pengujian Hipotesis



Gambar 3 Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil Output WarpPLS 3.0 yang telah diolah

Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,39 dan signifikan dengan p value < 0,01. Hal ini berarti bahwa H_1 diterima yaitu terdapat pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten TTU. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi SDM maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten TTU.

Berdasarkan jawaban atas tanggapan responden terhadap kompetensi SDM, diketahui bahwa OPD pada kabupaten TTU memiliki aparatur/pegawai yang cukup berpengalaman dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu pelaksanaan tugas oleh aparatur/pegawai pada OPD telah mematuhi ketepatan waktu dan kewajiban sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing dalam mengelola keuangan daerah dan memberikan pertanggungjawaban melalui LKPD yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori kompetensi (Spencer dan Spencer, 1993) yang menjelaskan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat kerja. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai di bidang pendidikan atau yang lebih spesifik di bidang akuntansi maupun yang memiliki kompetensi melalui pengalaman kerja serta pelatihan karena lamanya masa kerja mereka di bidang akuntansi akan mampu bekerja secara

lebih efektif dan efisien sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dapat berkualitas.

Sejalan dengan itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Call et.al (2017) membuktikan bahwa kompetensi SDM yang diukur melalui tingkat pendidikannya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kualitas karyawan yang diukur berdasarkan tingkat pendidikannya memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Karyawan yang berpendidikan tinggi cenderung melakukan lebih sedikit kesalahan dalam penyusunan dan penyajian dan laporan keuangan. Anggraini (2014) menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Arum (2016) menemukan bahwa kualitas informasi akuntansi yang tertuang dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh kompetensi manajemen.

Pengendalian Internal Memoderasi Hubungan Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten TTU yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah. Hipotesis ini ditolak karena sebagian besar OPD pada kabupaten TTU telah mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipahami dan menyajikan informasi yang lengkap serta menggunakan istilah yang telah disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna. Kualitas laporan keuangan yang memadai ini didukung oleh adanya kompetensi SDM pada setiap OPD di Kabupaten TTU. kompetensi ini mencakup pengetahuan, pendidikan dan pengalaman kerja. Sehingga dengan atau tanpa adanya kegiatan pengendalian dan pengawasan dari pemerintah OPD telah mampu menghasilkan LKPD yang cukup berkualitas. Berdasarkan tanggapan responden diketahui bahwa masih ada sebagian kecil OPD yang penyajian laporan keuangannya masih kurang memadai. Inilah alasan kabupaten TTU masih belum memperoleh opini WTP dari BPK.

Dalam kaitannya dengan teori kompetensi (Spencer dan Spencer, 1993) yang menjelaskan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat kerja. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai di bidang pendidikan atau yang lebih spesifik di bidang akuntansi maupun yang memiliki kompetensi melalui pengalaman kerja serta pelatihan karena lamanya masa kerja mereka di bidang akuntansi akan mampu bekerja secara lebih efektif dan efisien sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dapat berkualitas. Tanpa adanya sumber daya manusia suatu entitas tidak dapat menjalankan aktivitasnya.

Dalam kaitannya dengan teori keagenan, dalam konteks pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif dan publik. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan tentang semua kewajiban dan hak pihak – pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pemerintah menerapkan sistem akuntansi dengan mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga merupakan perwujudan perilaku pemerintah sebagai agent yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dalam kaitannya dengan teori entitas setiap OPD yang merupakan suatu entitas akuntansi telah meyenggarakan sistem akuntansi dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini mendukung riset terdahulu yang dilakukan oleh Hidayati dan Dianawati (2017) yang menggunakan pengendalian internal sebagai pemoderasi dan hasilnya tidak signifikan. Sejalan dengan itu hasil penelitian dari Fikri (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hasil dari riset yang dilakukan oleh Hidayati dan Dianawati (2017) yang menggunakan pengendalian internal sebagai pemoderasi dan menemukan hasil yang tidak signifikan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Suarmika dan Saputra (2016) yang membuktikan bahwa pengendalian internal memoderasi hubungan pengaruh antara kapasitas SDM terhadap kualitas LKPD. Sejalan dengan itu Nugraha (2015) juga berhasil membuktikan pengendalian internal sebagai pemoderasi antara pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.

Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah (a) Terdapat pengaruh antara kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten TTU. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi SDM maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten TTU; (b) tidak terdapat pengaruh kompetensi SDM kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh pengendalian internal pada pemerintah kabupaten TTU.

Daftar Pustaka

- Afiah, Nunuy N. Dan Rahmatika, Dien N. 2014. Factors Influencing The Quality Of Financial Reporting And Its Implications On Good Government Governance Research On Local Government Indonesia) *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 5, Issue 1 (Dec) ISSN 2289-1552.
- Afiah, N. Dan Aswari, C. 2015. The Effect Of The Implementation Of Government Internal Control System (GICS) On The Quality Of Financial Reporting Of The Local Government And Its Impact On The Principles Of Good Governance : A Research In District, City And Provincial Government In South Sumatera. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (2015) 811-818.
- Altamuro, J and Beatty, A. 2010. How Does Internal Ontrol Regulation Affect Financial Reporting. *Journal of Accounting & Economic* 49 (2010) 58-24
- Albalate, Daniel. 2012. *The Institutional, Economic and Social Determinants of Local Government Transparency*. Research Institute of Applied Economics. Working Paper 012/10 30 pag.
- Anggraini, D.T. dan Riduawan, A. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo), *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol.3 No. 3 (2014).
- Arens, A.A, Randal J, dan Beasley, *Auditing and Assurance service : An Integrated Approach. M.S. 2012. ^h Edition*. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Timor Tengah Utara tahun 2016*.

- _____, 2017. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Timor Tengah Utara tahun 2017.*
- _____, 2017. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2016.*
- Call, Andrew C. Chambell John L. Dhaliwal, S. and Jr. Moon, James R. 2017. Employee Quality And Financial Reporting Outcomes. *Journal of Accounting & Economics* 64 (2017) 123-149.
- Fikri, M. Ali, Inapty, B.A. dan Martiningsih, S.P. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating. *Simposium Nasional Akuntansi.*
- Ghozali, I. 2011. *Structural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square.* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2014. *Structural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square.* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Herawati, T. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur) *STAR – Study & Accounting Research / Vol XI, No. 1 – 2014.*
- Hidayati, N. dan Dianawati, W. 2017. Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Pada Pengaruh Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 02, No. 02 (2017): 54-72.
- Inapty, M. Ali F. B. A. dan Martiningsih, RR. Sri P. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi* Vol. 9 No.1 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN:2461-1190.
- Kock, N. 2011. Using WarpPLS in e-collaboration Studies : Descriptive Statistics, Setting, and Key Analysis Result. *International Journal of e-Collaboration*, 7(2), 1-18.
- Mulyani, S. and Arum, Enggar D.P. 2016. The Influence Of Manager Competency and Intern Control Effectiveness Toward Accounting Information Quality. *IJABER*, Vol 14 No.1.
- Nugraha, Tarjono. A. 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Desentralisasi Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Pengawasan Internal sebagai Pemoderasi. *Media Ekonomi dan Manajemen* Vol. 30, No. 1. ISSN: 0854-1442.
- Republik Indonesia. *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi NTT*
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- _____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*
- Sholihin, M. dan Ratmono, D. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan Warp PLS 3.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis.* Yogyakarta : Andi.

EkOPEM : Jurnal Ekonomi Pembangunan

- Spencer, L.M. dan Spencer, S.M. 1993. *Competence Work: Model for Superior Performance*. John Wiley and Sons. Inc.
- Suarmika, I Gusti L. dan Saputra, I Dewa G. D. 2016. Kemampuan Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Kapasitas SDM Dan Penerapan SIKD Pada Kualitas LKPD Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.9. ISSN : 2337-3067
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.